



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2014**

**BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

PURWODADI 2015



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan karunia-Nya, kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2014, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja kami masih jauh dari sempurna. Karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja kami ke depan. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama selama ini.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang.

Purwodadi, Maret 2015

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO, SH



EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Grobogan, yaitu : "**Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.**" Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan 6 Misi 20 Tujuan dan 52 Sasaran Strategis dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016. Sehingga untuk mewujudkan Sasaran Strategis dimaksud, Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2014, terdiri dari sepuluh prioritas, yaitu :1)Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal, 2)Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan, 3)Peningkatan kualitas pelayanan publik, 4)Peningkatan pemerataan pembangunan, 5)Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 6)Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial, 7)Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua, 8)Peningkatan kesadaran hukum, 9)Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik, dan 10)Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas.

Terkait hal tersebut, pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah merealisasikan Belanja Daerah sebesar Rp1.645.804.824.542,00 atau **92,03 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2014 sebesar Rp1.788.253.908.250,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2014 mengalami kenaikan 9,14 persen jika dibandingkan dengan TA 2013. Sedangkan Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar Rp1.711.056.213.805,00 atau mencapai **104,18 persen** dari target APBD Perubahan TA 2014 sebesar Rp1.642.386.125.000,00. Realisasi Pendapatan TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,41 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah tersebut, maka terjadi Surplus Anggaran pada TA 2014 sebesar Rp65.251.389.263,00.

Secara umum, capaian kinerja Sasaran Strategis tahun keempat RPJMD Kabupaten Grobogan 2011 – 2016 tercapai dengan **kualifikasi Sangat Baik (skor = 111,009%)** meskipun turun 2,671% dibanding capaian kinerja pada Tahun 2013 (skor 2013 = 113,680%). Sebagai bukti pendukung keberhasilan peningkatan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, selama Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima beberapa penghargaan, antara lain : Penghargaan Nasional Transmigration Award Tahun 2014, Sertifikat Adipura, Sekolah Adiwiyata Nasional, Juara I Tingkat Nasional Lomba Kelompok Tani Kedelai, Juara I dan III Tingkat Nasional Lomba Situs Web Antar SKPD Lingkup Pertanian, Juara I



Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun keempat juga dapat dilihat dari pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2014 positif, mencapai 4,24%; Laju Inflasi Tahun 2014 sebesar 8,03%, lebih kecil dibanding inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 8,22%; Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013 sebesar 14,87%, turun 1,27% dibanding tahun sebelumnya; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,25%, turun 1,80% dibanding tahun sebelumnya.

Dalam pelaporan LKjIP Kabupaten Grobogan Tahun 2014 disamping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 : Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.						
Sasaran		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
1.1	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.	5	3	1	1	
1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.	3	3			
1.3	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.	2	1			1
1.4	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri.	5	1	3	1	
1.5	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.	2	2			
1.6	Meningkatnya ketersediaan pusat -pusat pembinaan kesehatan.	3	2	1		



1.7	Meningkatnya ketersediaan alat- alat pelayanan kesehatan.	7	7			
1.8	Meningkatnya ketersediaan pusat -pusat kegiatan pendidikan.	7	5		1	1
1.9	Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.	6	5		1	
1.10	Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.	1	1			
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			30	5	4	2
Rata – Rata Capaian Misi 1			Baik Sekali (118,4%)			
Misi 2 : Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
2.1	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.	1	1			
2.2	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.	3	3			
2.3	Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.	7	7			
2.4	Meningkatnya tingkat keberapaan lulusan pendidikan kejuruan.	1	1			
2.5	Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan-satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD–SLTA dan lembaga pendidikan non formal.	1				1
2.6	Meningkatnya Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.	1	1			



2.7	Meningkatnya Persentase guru yang telah tersertifikasi.	3	1		1	1
2.8	Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.	5	4	1		
2.9	Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.	1	1			
2.10	Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.	1		1		
2.11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm keg. olah raga.	1		1		
2.12	Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.	1		1		
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			19	4	1	2
Rata – Rata Capaian Misi 2			Baik Sekali (115,55%)			
Misi 3 : Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
3.1	Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.	1	1			
3.2	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.	1				1
3.3	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	1			1	
3.4	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	3	1		1	1



3.5	Semakin minimalnya Persentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.	1	1			
3.6	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.	2	1		1	
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			4		3	2
Rata – Rata Capaian Misi 3			Baik (80,97%)			
Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
4.1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	8	5	2	1	
4.2	Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.	4	3	1		
4.3	Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.	2	2			
4.4	Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.	6	3	1		2
4.5	Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.	1				1
4.6	Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.	6	5	1		
4.7	Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.	3	1	1	1	
4.8	Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.	5	4			1



4.9	Meningkatnya dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.	4	2	1		1
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			25	7	2	5
Rata – Rata Capaian Misi 4			Baik Sekali (121%)			
Misi 5 : Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
5.1	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.	4	3	1		
5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan program keluarga berencana.	8	6		1	1
5.3	Meningkatnya aktivitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.	2	2			
5.4	Meningkatkan kesetaraan gender	3	2		1	
5.5	Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.	1				1
5.6	Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.	1		1		
5.7	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.	4	3	1		
5.8	Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.	4	4			
5.9	Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.	1			1	
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			20	3	3	2



Rata – Rata Capaian Misi 5			Baik Sekali (88,59%)			
Misi 6 : Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.						
SASARAN STRATEGIS		Jumlah Indikator	Kategori Capaian Target Kinerja			
			Baik sekali (85%>)	Baik (70-85%)	Cukup (55-70%)	Kurang (0-55%)
6.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.	4	3			1
6.2	Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan.	4	3		1	
6.3	Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.	2	1		1	
6.4	Meningkatnya upaya reboisasi.	3	3			
6.5	Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.	1				1
6.6	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.	6	5	1		
JUMLAH KATEGORI CAPAIAN			15	1	2	2
Rata – Rata Capaian Misi 6			Baik Sekali (138,28%)			
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2014			Baik Sekali (111,009%)			
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2013			Baik Sekali (113,680%)			

Secara umum Pemerintah Kabupaten Grobogan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016. Lima puluh dua Sasaran Strategis dalam RPJMD yang di dalamnya memiliki indikator kinerja sasaran / indikator kinerja utama sebanyak 163 (*seratus enam puluh tiga*) indikator dapat dicapai dengan rata-rata *sangat berhasil / baik sekali*.



Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas Pokok Dan Fungsi di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah terlaksana dengan baik dalam artian keseluruhan program – program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ada pada Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang perlu menjadikan perhatian dan diharapkan di tahun mendatang akan lebih dioptimalkan kinerjanya dikarenakan ditemui kendala/hambatan.

Dari ke-lima puluh dua sasaran dengan 163 Indikator Kinerja Utama, 15 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai kurang atau gagal, 15 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai cukup, 20 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai baik, 113 indikator mencerminkan pencapaian target dengan nilai baik sekali. secara akumulatif rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan mencapai 111,009%. Nilai tersebut jika diklasifikasikan dengan tingkatan keberhasilan, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 berpredikat baik sekali atau “sangat berhasil”.

Meski demikian akan selalu dilakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan sebagai bahan rujukan untuk perbaikan manajemen, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Grobogan di masa-masa mendatang.



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2014, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 16 Maret 2015

INSPEKTUR KABUPATEN GROBOGAN

ADI DJATMIKO, SH, MH
NIP. 19580819 198603 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	1
1. Kondisi Geografis	5
2. Kondisi Demografi	12
3. Kondisi Ekonomi	19
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
A. Perencanaan Kinerja	
A.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Grobogan Tahun 2011 – 2016	28
A.2. Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2014	34
B. Penetapan/ Perjanjian Kinerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	62
A. Capaian Kinerja Organisasi	62
A.1. Capaian Kinerja Makro	63
A.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	64
A.1.2. Perkembangan Pendidikan (APK dan APM)	66
A.1.3. Angka Kemiskinan	68
A.1.4. AKB, AKI, AKABA, BBLR dan Prevalensi Gizi Buruk	70
A.1.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	74
A.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	81



B. Realisasi Anggaran	131
B.1. Pendapatan	131
B.2. Belanja	132
B.3. Pembiayaan Netto	134
B.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	135
B.5. Aset Tetap	135
C. Monitoring dan Evaluasi Internal	137
D. Prestasi dan Penghargaan	141
BAB IV PENUTUP	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah	3
Tabel I.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2013 – 2014	5
Tabel I.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2014	6
Tabel I.4	Kepadatan Penduduk Tahun 2014	7
Tabel I.5	Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2014	9
Tabel I.7	Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2014	11
Tabel I.8	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2009-2014	13
Tabel I.9	Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2011 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	14
Tabel I.10	Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	15
Tabel I.11	Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Berlaku	15
Tabel I.12	PDRB Perkapita Tahun 2011 - 2014	16
Tabel I.13	Perbandingan Angka Inflasi Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2014	17
Tabel I.14	Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2014	18
Tabel II.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2014	34
Tabel II.2	Penetapan Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2014	37
Tabel III.1.a	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014	62
Tabel III.1.b	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Grobogan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	65
Tabel III.2	Perbandingan IPM Kab. Grobogan dan Prov. Jawa Tengah beserta Komposit Pembentuknya	66
Tabel III.3	APM dan APK SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/SMK/MA Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014	67
Tabel III.4	APM dan APK SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013	68
Tabel III.5	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2014	69
Tabel III.6	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	70
Tabel III.7	Angka Kematian Ibu,Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2011–2014	71
Tabel III.8	Perbandingan Prevalensi Gizi Buruk Balita dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012	73
Tabel III.9	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014	74
Tabel III.10	Pertumbuhan Sektoral Terhadap PDRB Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	75
Tabel III.11	Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2011 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku	76
Tabel III.12	Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	77



Tabel III.13	Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Berlaku	78
Tabel III.14	PDRB Per Kapita Tahun 2011-2014	79
Tabel III.15	Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014 ..	79
Tabel III.16	Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2014	80
Tabel III.17	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Tahun 2014	81
Tabel III.18	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Transportasi	87
Tabel III.19	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Pertanian dalam Arti Luas	88
Tabel III.20	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Perdagangan	89
Tabel III.21	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Pengembangan Industri	90
Tabel III.22	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.5 Meningkatnya Ketersediaan Sarana-Prasarana Pariwisata	91
Tabel III.23	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.6 Meningkatnya Ketersediaan Pusat -Pusat Pembinaan Kesehatan	91
Tabel III.24	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.7 Meningkatnya Ketersediaan Alat- Alat Pelayanan Kesehatan	92
Tabel III.25	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.8 Meningkatnya Ketersediaan Pusat -Pusat Kegiatan Pendidikan	94
Tabel III.26	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.9 Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan	95
Tabel III.27	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.10 Meningkatnya Ketersediaan Gedung-Gedung Perkantoran beserta Peralatannya bagi Kegiatan Pemerintahan hingga Pedesaan	97
Tabel III.28	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	97
Tabel III.29	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Menurunnya Angka Buta Aksara Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	98
Tabel III.30	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA	98
Tabel III.31	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.4 Meningkatnya Tingkat Kebekerjaan Lulusan Pendidikan Kejuruan	99
Tabel III.32	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.5 Meningkatnya Perolehan Jenjang Akreditasi Bagi Satuan-Satuan Pendidikan Baik di Negeri Maupun Swasta Pada Jenjang SD-SLTA dan Lembaga Pendidikan Non Formal	100
Tabel III.33	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.6 Meningkatnya Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D4	100



Tabel III.34	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.7 Meningkatnya Persentase Guru yang telah Tersertifikasi	101
Tabel III.35	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.8 Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kependidikan Dalam Pengelolaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan	102
Tabel III.36	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.9 Meningkatnya Revitalisasi Organisasi Kepemudaan Dan Pramuka	103
Tabel III.37	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.10 Meningkatnya Penguasaan Teknologi, Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas Pemuda	103
Tabel III.38	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.11 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olah Raga	104
Tabel III.39	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.12 Meningkatnya Prestasi Olah Raga di Tingkat Daerah, Provinsi, maupun Nasional	104
Tabel III.40	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya Umur Harapan Hidup Masyarakat	105
Tabel III.41	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	106
Tabel III.42	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	106
Tabel III.43	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita	107
Tabel III.44	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.5 Semakin Minimalnya Persentase Absensi para Pekerja/ Pegawai/ Aparat yang Disebabkan Gangguan Kesehatan	108
Tabel III.45	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.6 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular	108
Tabel III.46	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	109
Tabel III.47	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya Produksi Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan	110
Tabel III.48	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Meningkatnya Aset Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	110
Tabel III.49	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.4 Meningkatnya Peran Penyuluh Pertanian dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian	111
Tabel III.50	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.5 Meningkatnya Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan Hama serta Penyakit Tanaman	112
Tabel III.51	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.6 Meningkatnya Ketrampilan Usaha Industri dan Berkembangnya Usaha Industri	113
Tabel III.52	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.7 Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha Perdagangan Masyarakat	114
Tabel III.53	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.8 Meningkatnya Usaha di Sektor Pariwisata	115



Tabel III.54	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.9 Meningkatkan dan Berkembangnya Kelembagaan Koperasi sebagai Wadah Aktifitas Ekonomi Masyarakat	116
Tabel III.55	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan	117
Tabel III.56	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Program Keluarga Berencana	118
Tabel III.57	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.3 Meningkatkan Aktivitas Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat	120
Tabel III.58	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.4 Meningkatkan Kesetaraan Gender	121
Tabel III.59	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.5 Meningkatkan Iklim Politik yang Kondusif Bagi Berkembangnya Kualitas Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Rakyat yang Semakin Seimbang dengan Peningkatan Kepatuhan Terhadap Hukum	122
Tabel III.60	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.6 Meningkatkan Keberhasilan Menyelenggarakan Pemilu 2014 yang Demokratis. Rahasia dengan Tingkat Partisipasi Rakyat yang Optimal	122
Tabel III.61	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.7 Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi	123
Tabel III.62	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.8 Meningkatkan Kepatuhan Semua Pihak terhadap Tegaknya Hukum yang Berlaku	124
Tabel III.63	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.9 Meningkatkan Kepercayaan dan Penghormatan Publik kepada Aparat dan Lembaga Penegak Hukum	125
Tabel III.64	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelestarian Lingkungan	125
Tabel III.65	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Meningkatkan Kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Terhadap Adanya Berbagai Jenis Limbah dan Pencemaran Lingkungan	126
Tabel III.66	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.3 Terciptanya Keresasian antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	128
Tabel III.67	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.4 Meningkatkan Upaya Reboisasi	129
Tabel III.68	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.5 Meningkatkan Ketersediaan Air Tanah/Sumber Air	129
Tabel III.69	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.6 Meningkatkan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam	130
Tabel III.70	Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA 2014 serta realisasi TA 2013	131
Tabel III.71	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanj per Fungsi Tahun 2014 dengan Tahun 2013	134
Tabel III.72	Pembiayaan Netto Tahun 2014	135
Tabel III.73	SILPA Tahun Anggaran 2014	135
Tabel III.74	Rincian Aset Tetap	136
Tabel III.75	Rincian Komponen Penambahan dan Pengurangan Aset	137
Tabel III.76	Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2013 dan Tahun 2014	138





DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah	2
Gambar I.2	Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2014	9
Gambar I.3	Grafik Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2014	10
Gambar I.4	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan	13
Gambar I.5	Bagan Pola Hubungan Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

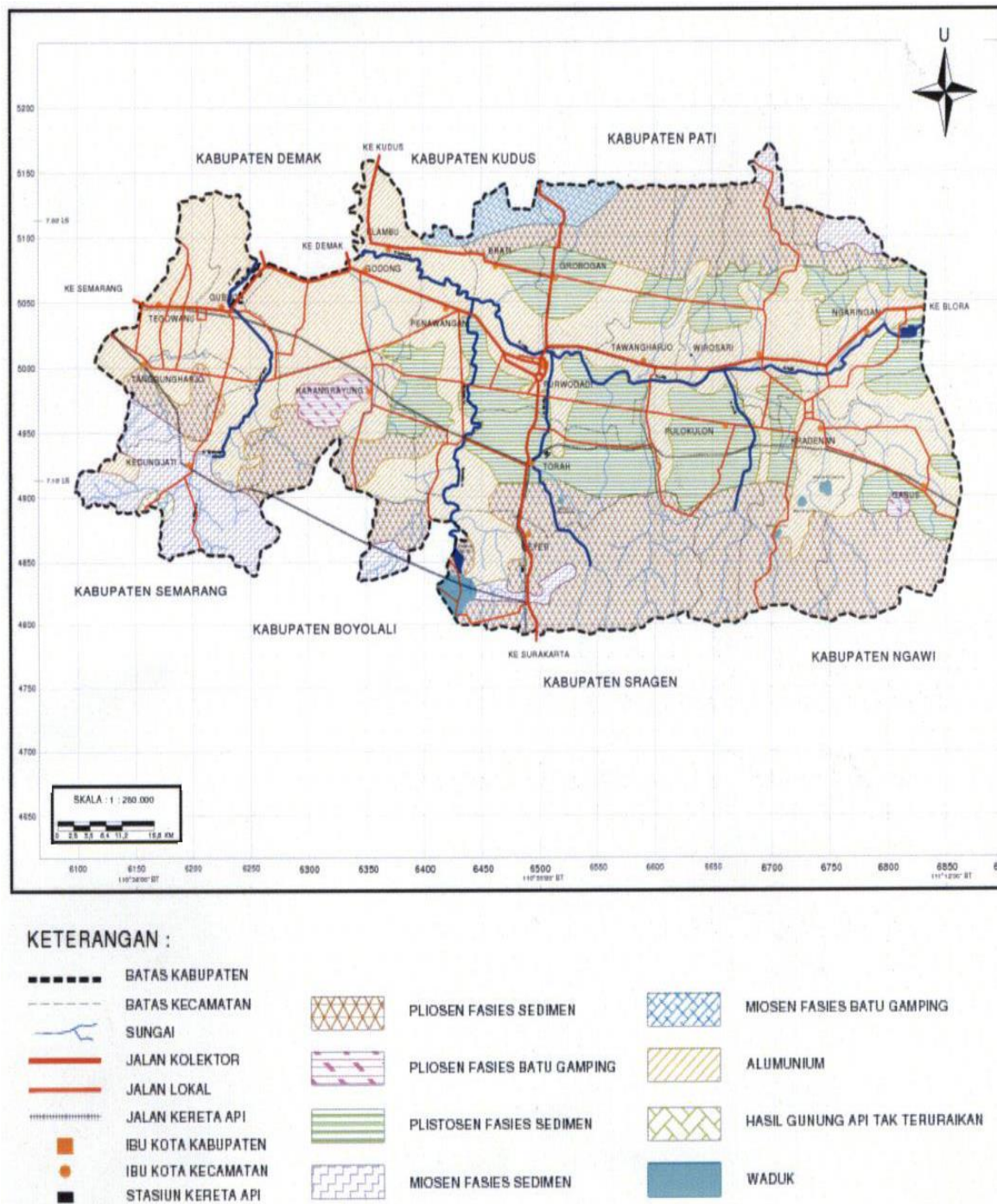
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar I. 1.
Peta Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang \pm 83 km dan dari utara ke selatan \pm 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Grobogan terbagi/terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan, sebagaimana tampak dalam Tabel I.1 berikut :



Tabel I.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH DUSUN/LINGK	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,320
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	112	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,720
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	51	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	86	86,780
17	Gubug	21	62	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,670
19	Tanggungharjo	9	31	60,628
Jumlah		280	1.451	1.975,86

Sumber : Bag.Tata Pemerintahan Setda Kab.Grobogan



Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha terdiri dari tanah sawah, bukan sawah dan lahan bukan pertanian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah sawah seluas 66.184 Ha terdiri dari:
 - 1) Irigasi : 29.881 Ha
 - 2) Tadah Hujan : 36.303 Ha
- b. Tanah bukan sawah seluas 44.129 Ha terdiri dari :
 - 1) Sementara tidak diusahakan : 0 Ha
 - 2) Tegalan/Kebun : 23.917 Ha
 - 3) Ladang/huma : 0 Ha
 - 4) Perkebunan : 87 Ha
 - 5) Hutan Rakyat : 4.160 Ha
 - 6) Padang Rumput : 0 Ha
 - 7) Lain-lain : 71.510 Ha
- c. Tanah Lahan bukan pertanian seluas 31.728 Ha

Kabupaten Grobogan dibagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut rata-rata (*mean sea level*) dengan kemiringan antara 0 – 8^o. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- b. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan antara 8-15^o dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- c. Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan air laut, rata-rata dengan kemiringan tanah di atas 15^o, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan memiliki sumber bahan tambang dan galian yang cukup dapat diandalkan, meskipun sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga saat ini masih relatif kecil. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala seperti cara penambangan, cara pengolahan hasil dan sumber daya manusianya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan terbukanya kesempatan



bagi pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya guna mengelola bahan tambang dan galian secara optimal.

Bahan tambang/galian yang dimiliki dan mungkin dapat dikembangkan di Kabupaten Grobogan meliputi : kapur, tanah liat, garam, gips, batu dan lain-lain.

2. Kondisi Demografi

a. Laju Pertumbuhan

Penduduk Kabupaten Grobogan pada akhir tahun 2014 berjumlah 1.412.325 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2013 sebesar 1.402.760 jiwa, maka terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 9.565 jiwa dengan demikian angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,68%. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk semua keperluan.

Perkembangan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2013 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel I.2 berikut:

Tabel I. 2
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2013-2014

No.	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERTUMBUHAN (%)
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN		
1	2013	705.352	697.408	1.402.760	0,54
2	2014	713.077	699.248	1.412.325	0,68

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Dan Sex Rasio

Jika dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan lebih besar berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki



sebanyak 713.077 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 699.248 jiwa, maka sex ratio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, maka Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 131.590 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 38.195 jiwa.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex ratio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.3 berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2014

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		L	P	TOTAL	
1	KEDUNGJATI	22.411	22.080	44.491	98,52
2	KARANGRAYUNG	47.764	46.873	94.637	98,13
3	PENAWANGAN	31.918	31.597	63.515	98,99
4	TOROH	57.406	57.120	114.526	99,50
5	GEYER	33.394	33.000	66.394	98,82
6	PULOKULON	53.270	51.080	104.350	95,89
7	KRADENAN	40.879	39.846	80.725	97,47
8	GABUS	36.653	35.675	72.328	97,33
9	NGARINGAN	34.390	33.061	67.451	96,14
10	WIROSARI	45.089	44.258	89.347	98,16
11	TAWANGHARJO	28.660	27.579	56.239	96,23
12	GROBOGAN	38.096	36.751	74.847	96,47
13	PURWODADI	65.869	65.721	131.590	99,78



14	BRATI	24.811	24.042	48.853	96,90
15	KLAMBU	19.497	18.698	38.195	95,90
16	GODONG	42.741	42.679	85.420	99,85
17	GUBUG	41.697	41.118	82.815	98,61
18	TEGOWANU	27.531	27.031	54.562	98,18
19	TANGGUNG HARJO	21.001	21.039	42.040	100,18
	JUMLAH	713.077	699.248	1.412.325	98,06

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

c. Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang didiami. Karena itu kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2014 terlihat dalam Tabel I.4 dibawah ini :

Tabel I.4
Kepadatan Penduduk Tahun 2014

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN (Jiwa/KM2)
1	Kedungjati	130,342	44.491	341,34
2	Karangrayung	140,595	94.637	673,12
3	Penawangan	74,177	63.515	856,26
4	Toroh	119,320	114.526	959,82
5	Geyer	196,192	66.394	338,41
6	Pulokulon	133,644	104.350	780,81
7	Kradenan	107,748	80.725	749,20
8	Gabus	165,365	72.328	437,38

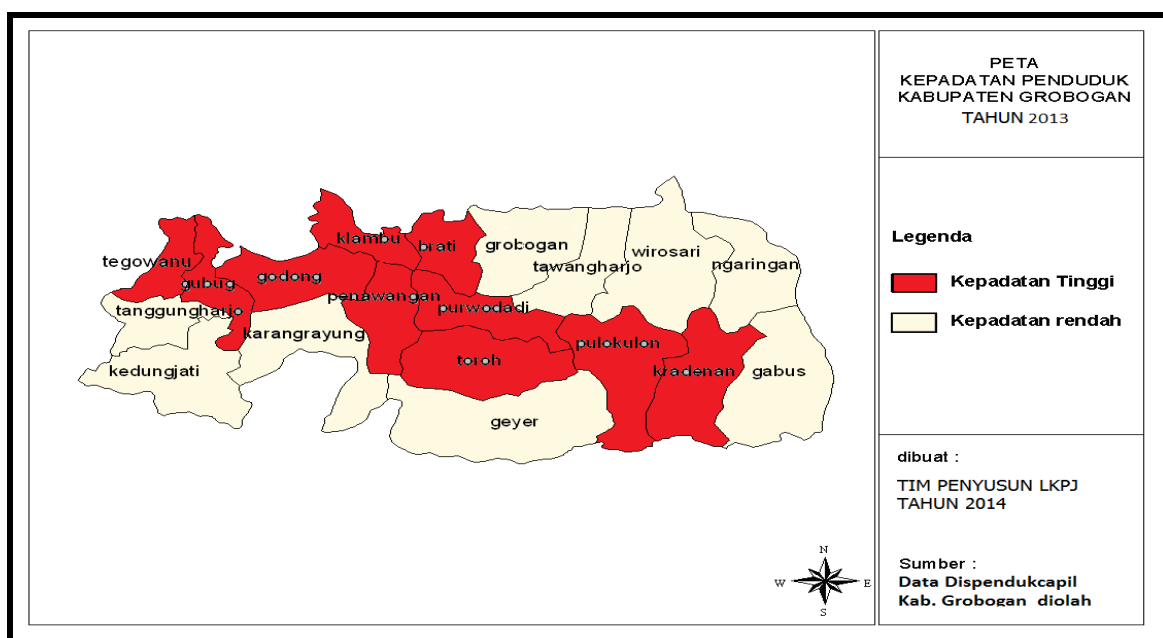


9	Ngaringan	116,720	67.451	577,89
10	Wirosari	154,298	89.347	579,05
11	Tawangharjo	83,602	56.239	672,70
12	Grobogan	104,556	74.847	715,86
13	Purwodadi	77,656	131.590	1.694,52
14	Brati	54,891	48.853	890,00
15	Klambu	46,562	38.195	820,30
16	Godong	86,780	85.420	984,33
17	Gubug	71,119	82.815	1.164,46
18	Tegowanu	51,670	54.562	1.055,97
19	Tanggunharjo	60,628	42.040	693,41
	JUMLAH	1.975,865	1.412.325	714,78

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa Kecamatan Purwodadi memiliki tingkat kepadatan tertinggi sebesar 1.694 Jiwa/Km². Hal ini wajar karena Purwodadi merupakan Ibukota Kabupaten Grobogan. Sementara kecamatan yang masuk dalam kategori kepadatan tinggi karena memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi dari kepadatan Kabupaten adalah Kecamatan Pulokulon, Penawangan, Toroh, Kradenan, Klambu, Godong, Gubug, Brati, Grobogan dan Tegowanu. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan rendah, karena memiliki tingkat kepadatan lebih rendah dibanding kepadatan Kabupaten adalah kecamatan Geyer, Kedungjati, Karangrayung, Ngaringan, Gabus, Wirosari, Tawangharjo, dan Tanggunharjo.

Berikut peta kepadatan penduduk Kabupaten Grobogan, sebagaimana gambar I.2 sebagai berikut :



**Gambar I.2
Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2014**

d. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I. 5
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2014**

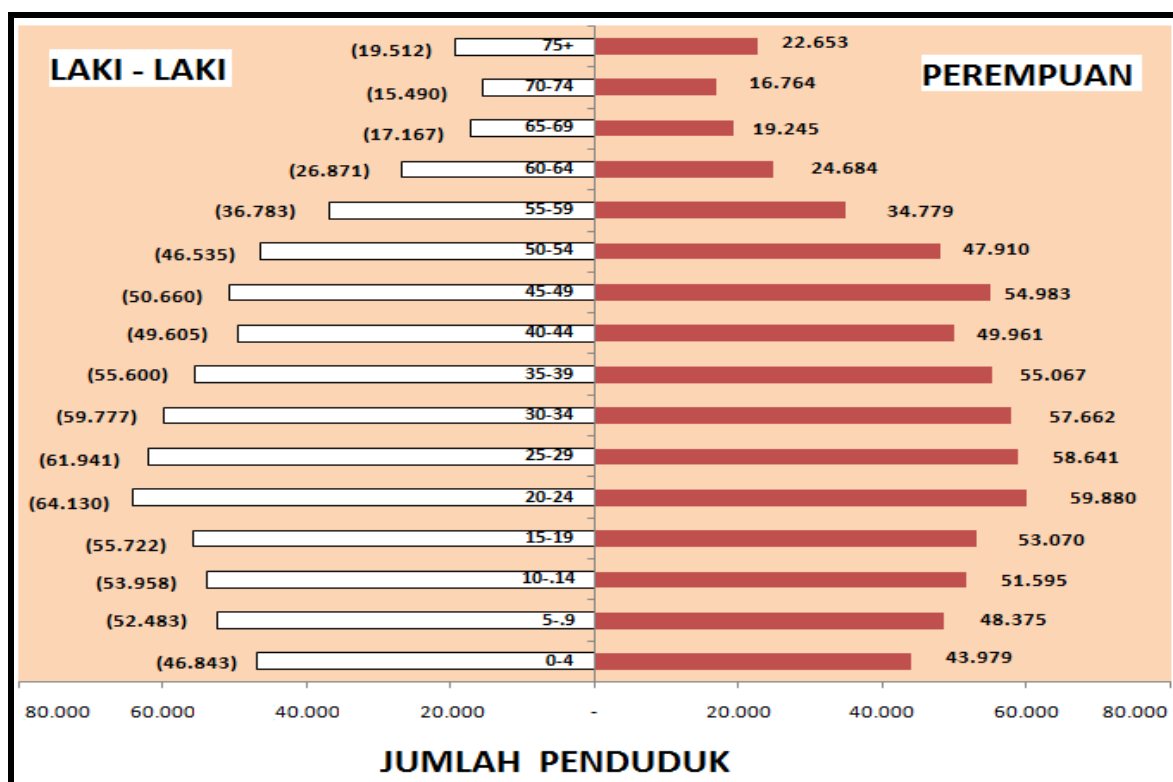
No.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	0-4	46.843	43.979	90.822
2	5-9	52.483	48.375	100.858
3	10-14	53.958	51.595	105.553
4	15-19	55.722	53.070	108.792
5	20-24	64.130	59.880	124.010
6	25-29	61.941	58.641	120.582
7	30-34	59.777	57.662	117.439
8	35-39	55.600	55.067	110.667



9	40-44	49.605	49.961	99.566
10	45-49	50.660	54.983	105.643
11	50-54	46.535	47.910	94.445
12	55-59	36.783	34.779	71.562
13	60-64	26.871	24.684	51.555
14	65-69	17.167	19.245	36.412
15	70-74	15.490	16.764	32.254
16	75 +	19.512	22.653	42.165
	TOTAL	713.077	699.248	1.412.325

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Dari data diatas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar I.5 sebagai berikut :



Gambar. I.3
Grafik Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2014



Dari piramida penduduk diatas dapat diketahui angka ketergantungan penduduknya. Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-65 tahun), karena mencapai 1.004.261 jiwa atau 71,1 %, kemudian kelompok usia bukan produktif (usia 0-15 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 408.064 jiwa atau 28,89%, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi.

e. Tingkat Pengangguran

Sementara untuk angka pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2008 sampai akhir tahun 2014, mengalami tren penurunan, selengkapnya dilihat dalam tabel I.7 sebagai berikut:

Tabel I.7
Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2014

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGKATAN KERJA	JUMLAH PENYERAPAN	YANG BELUM TERSERAP	PREDIKSI PENGANGGURAN (%)
1	2008	705,694	662,037	43,657	6.19
2	2009	767,310	720,700	46,610	6.07
3	2010	769,624	734,231	35,393	4.60
4	2011	731,572	693,556	38,016	5.20
5	2012	778,813	745,068	33,745	4.33
6	2013	755,761	710,014	45,747	6.05
7	2014	751,484	719,573	31,911	4.25

Sumber : BPS Kab.Grobogan



3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Daerah

Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan dari segi produksi, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima oleh masyarakat dan menarik investor. Sesuai kondisi geografis/potensi wilayah yang ada, produk unggulan di Kabupaten Grobogan adalah : padi, jagung, kedelai, dan batu kapur, mebel serta genteng press.

Selain produk unggulan Kabupaten Grobogan juga memiliki produk andalan yaitu produk yang dapat diandalkan oleh suatu daerah karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah, diantaranya adalah : sapi bibit, sale pisang, melon merah, kecap, paha katak, sarang burung walet dan kerajinan alat pertanian.

b. Pertumbuhan PDRB

Secara makro, Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Itu artinya perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2014 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,07 dan atas dasar harga konstan sebesar 4,24. Hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan PDRB, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam Tabel I.8 dan Gambar I.4 sebagai berikut :



Tabel I.8
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2009-2014

PDRB	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Atas Dasar Harga Berlaku	11,17	12,75	9,88	12,66	11,05	11,07
Atas Dasar Harga Konstan	5,03	5,05	3,59	6,16	4,59	4,24

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sangat sementara)



Gambar. I.4

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan

c. Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB

Pada tahun 2014, Jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, adalah sektor/bidang Perdagangan, Hotel dan Restaurant yang mencapai 7,76, sedangkan pertumbuhan terendah berada pada sektor pertanian yang hanya sebesar 5,03.



Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral terhadap PDRB pada tahun 2011 sampai dengan 2014 atas dasar harga konstan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel I.9 sebagai berikut :

Tabel I.9
Pertumbuhan Sektoral Terhadap PDRB Tahun 2011-2014
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014*)
1	Pertanian	0,73	5,03	0,68	0,62
2	Pertambangan dan Penggalian	6,94	13,82	8,14	7,31
3	Industri	5,60	5,62	6,28	6,94
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,61	6,02	7,36	6,32
5	Bangunan	5,06	7,21	7,13	6,13
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,24	7,02	6,94	7,76
7	Angkutan dan Komunikasi	6,74	8,07	7,09	7,66
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan	6,06	6,78	9,66	7,73
9	Jasa-Jasa	6,67	6,33	6,08	6,75
	Jumlah	3,59	6,16	4,59	4,24

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sangat sementara)

d. Perkembangan PDRB

Secara sektoral, kontribusi lapangan usaha dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terhadap PDRB atas dasar harga konstan tidak terjadi pergeseran yang berarti. Urutan tertinggi ditempati oleh kelompok lapangan usaha pertanian, kemudian lapangan perdagangan/hotel, restoran dan yang paling kecil lapangan usaha pertambangan. Tren ini juga berlaku untuk PDRB atas dasar harga berlaku.



Lebih jelas dapat dilihat pada pada Tabel I.10 dan Tabel I.11, sebagai berikut :

Tabel I.10
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011 - 2014
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No	Lapangan Usaha	Tahun (dalam jutaan)			
		2011	2012	2013	2014*)
1	Pertanian	1.347.492,62	1.415.220,85	1.422.619,55	1.415.904,55
2	Pertambangan/ Penggalian	51.519,06	58.638,99	63.997,43	68.046,38
3	Industri	114.916,31	121.375,89	129.002,60	137.960,38
4	Listrik, Gas dan air minum	48.743,10	51.679,20	55.483,93	58.992,66
5	Bangunan/ Konstruksi	160.231,19	171.783,86	184.029,35	195.310,35
6	Perdagangan/Hotel/ Rumah makan	616.880,74	660.165,83	705.519,06	760.803,69
7	Angkutan dan komunikasi	10.234,95	122.174,96	131.388,70	140.859,73
8	Perbankan dan lembaga keuangan	321.041,81	342.809,94	373.284,85	404.985,04
9	Jasa-jasa	596.471,13	634.213,27	676.924,36	718.196,70
	Jumlah	3.267.530,91	3.578.062,78	3.742.249,82	3.901.059,47

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sangat sementara)

Tabel I.11
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2011-2014
Atas Dasar Harga Berlaku

No.	Lapangan Usaha	Tahun (dalam jutaan)			
		2011	2012	2013	2014*)
1	Pertanian	3.054.164,39	3.428.780,64	3.677.748,69	3.970.906,32
2	Pertambangan/ Penggalian	96.034,86	114.955,30	131.198,49	148.411,73



3	Industri	209.446,64	234.472,05	263.495,74	297.338,88
4	Listrik, Gas dan air minum	119.653,10	132.088,81	149.698,21	171.871,80
5	Bangunan/Konstruksi	412.139,06	466.829,91	533.824,81	592.349,10
6	Perdagangan/Hotel/Rumah makan	1.294.984,09	1.471.879,77	1.676.655,76	1.916.508,66
7	Angkutan dan komunikasi	246.960,86	280.736,93	323.732,14	372.299,76
8	Perbankan dan lembaga keuangan	632.930,10	702.329,67	802.327,16	918.329,69
9	Jasa-jasa	1.075.148,53	1.213.385,00	1.374.873,60	1.544.462,98
	Jumlah	7.141.461,63	8.045.458,09	8.933.554,59	9.937.248,92

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sangat sementara)

e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, tahun 2014 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel I.12 sebagai berikut :

Tabel I. 12
PDRB per Kapita Tahun 2011 - 2014

Tahun	Jumlah Penduduk (Hasil Proyeksi Penduduk)	PDRB (Jutaan Rp)		PDRB per Kapita (Rp)	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2010	1,311,009	6,499,594.27	3,253,398.56	4,957,703.78	2,481,598.95
2011	1,319,775	7,141,461.62	3,370,343.70	5,411,120.55	2,553,725.98
2012	1,328,197	8,045,458.09	3,578,062.78	6,057,428.30	2,693,924.76
2013	1,336,304	8,934,577.58	3,742,249.81	6,686,036.70	2,800,447.96
2014 *)	1,343,960	9,932,478.92	3,901,059.47	7,390,457.24	2,902,660.40

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data Tahun 2014 merupakan angka sangat sementara)



Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2014 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp.2.902.660,40,- atau naik 3,65% dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.390.457,24,- atau naik sebesar 10,54%.

f. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 1,86. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagai berikut :

Tabel I.13
Perbandingan Angka Inflasi Kabupaten Grobogan dengan
Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2014

Kode	KABUPATEN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
3315	Grobogan	1.86	4.48	7.88	8.03
3309	Boyolali	3.35	3.45	8.21	7.45
3314	Sragen	2.86	3.74	7.55	7.11
3316	Blora	2.26	3.55	7.94	7.13
3318	Pati	2.30	3.92	7.57	8.01
3319	Kudus	3.34	4.77	8.31	8.59
3321	Demak	3.49	4.10	8.22	8.69
3322	Semarang	3.29	4.56	8.11	8.63
3300	Prov. Jawa Tengah	2.68	4.24	7.99	8.22

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2014 merupakan angka sangat sementara)



g. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari indikator nilai Indeks Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah (Kriteria Bank Dunia). Berdasarkan kriteria tersebut, maka kondisi pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel I.14
Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat
Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	Interpretasi
1.	Indeks Gini Ratio	0,2641	0,3535	0,34		Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di bawah batas ketimpangan (<0,35)
2.	Prosentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah	26,34%	18,91%	21,38%		Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di atas batas ketimpangan (>17%)

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2014 belum tersedia)

Berdasarkan data pada Tabel I.14, di atas dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah (*low inequality*) yang ditunjukkan dari indikator sebagai berikut :

- 1) Angka Indeks Gini Ratio selama lima tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 0,35.
- 2) Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah dalam lima tahun berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yakni 23,46% pada tahun 2010; 26,34% pada tahun 2011; 18,91% pada tahun 2012 dan 21,38% pada tahun 2013.



3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak dilaksanakan otonomi daerah Tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tentang penataan organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dan guna menghindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi maka pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya pada Tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Sehingga saat ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Terdiri dari :
 - 3.1. Dinas Pendidikan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pendidikan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan sejumlah 19 (sembilan belas) UPTD yang berada di setiap kecamatan dan 1 (satu) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan.
 - 3.2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah 7 (tujuh) UPTD yang berada di 6 (enam) wilayah eks Pembantu Bupati dan 1 (satu) UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.
 - 3.3. Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan terdiri dari 30 (tiga puluh) UPTD Puskesmas, 1 (satu) UPTD Gudang Farmasi, 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan dan 1 (satu) UPTD Pra Badan Pelayanan Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kesehatan.



- 3.4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) UPTD Transito dan 1 (satu) UPTD Balai Latihan Kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3.5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 (tiga) UPTD Terminal dan 1 (satu) UPTD Perparkiran untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
- 3.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3.7. Dinas Bina Marga, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bina marga sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum bina marga. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Bina Marga terdiri dari 6 (enam) UPTD Bina Marga Wilayah, 1 (satu) UPTD Workshop, dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Konstruksi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pekerjaan umum bina marga.
- 3.8. Dinas Pengairan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum pengairan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum pengairan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas



- Pengairan terdiri dari 6 (enam) UPTD Pengairan di tiap wilayah eks Pembantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pengairan.
- 3.9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi, usaha, kecil dan menengah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan koperasi, usaha, kecil dan menengah.
 - 3.10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari 7 (tujuh) UPTD Pasar Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Pasar Daerah.
 - 3.11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan, 1 (satu) UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - 3.12. Dinas Peternakan dan Perikanan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian khusus peternakan dan perikanan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian khusus peternakan dan perikanan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) UPTD Peternakan dan Perikanan, 1 (satu) UPTD Rumah Potong Hewan, dan 2 (dua) UPTD Balai Benih Ikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pertanian khusus peternakan dan perikanan.



- 3.13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan dan bidang pertanian khusus perkebunan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kehutanan dan pertanian khusus perkebunan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari 6 (enam) UPTD Kehutanan dan Perkebunan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kehutanan dan bidang pertanian khusus perkebunan.
- 3.14. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bidang cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum khusus cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari 6 (enam) UPTD Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, 1 (satu) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, 1 (satu) UPTD Work Shop, 1 (satu) UPTD Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pekerjaan umum bidang cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- 3.15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari 6 (enam) UPTD Pengelola Pendapatan Daerah di 6 (enam) wilayah eks-Pembantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

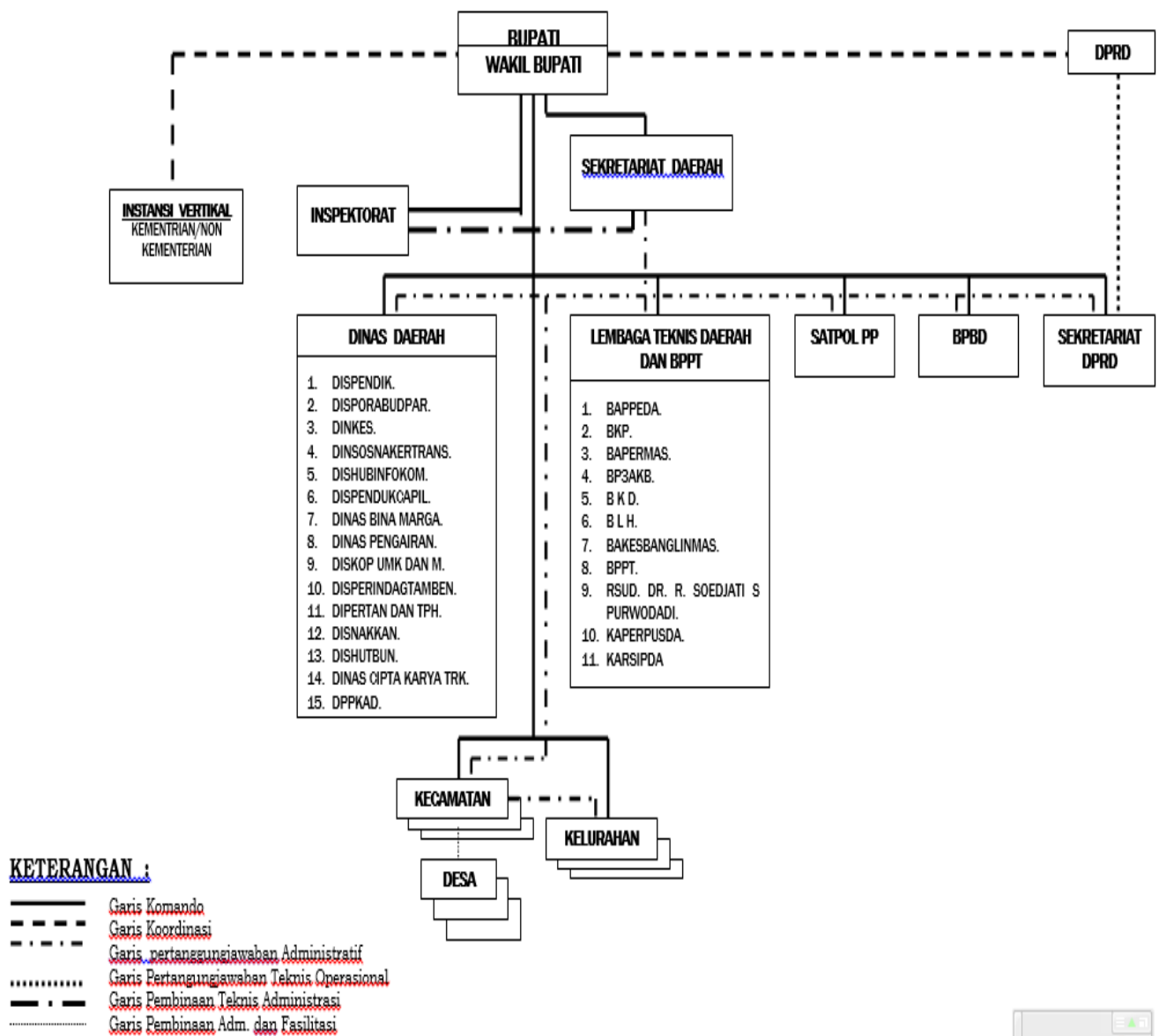


4. Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Perangkat Daerah lain yang berbentuk Badan dan atau Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 - 4.1. Inspektorat, adalah unsur pengawas yang merupakan badan pengawasan daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 4.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta di bidang penelitian dan pengembangan.
 - 4.3. Badan Ketahanan Pangan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Unsur pelaksana pada Badan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) UPTB Lumbung Cadangan Pangan yang melaksanakan urusan dan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
 - 4.4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
 - 4.5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Unsur pelaksana pada Badan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTB Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan yang melaksanakan urusan dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - 4.6. Badan Kepegawaian Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - 4.7. Badan Lingkungan Hidup, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - 4.8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang



- melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- 4.9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
 - 4.10. Kantor Perpustakaan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang perpustakaan daerah.
 - 4.11. Kantor Arsip Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang arsip daerah.
 - 4.12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perijinan secara terpadu dan penanaman modal.
 - 4.13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah perangkat daerah Kabupaten Grobogan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Kecamatan, Kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan berjumlah 19 (sembilan belas) yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 6. Kelurahan, Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan berjumlah 7 (tujuh), yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pola Hubungan Kerja antar Organisasi Perangkat Daerah tersebut diatas telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pola Organisasi dan Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah / Instansi Vertikal dan antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun Bagan Pola Organisasi dan Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal dan antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Gambar I.4 sebagai berikut :



Gambar I.4
Bagan Pola Hubungan Kerja
Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan



Saat ini (akhir Desember 2014), Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 10.004 orang pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jabatan struktural sebanyak 1.240 jabatan, yang terdiri dari :
 - a. Jabatan Eselon IIA sebanyak 1 jabatan (terisi);
 - b. Jabatan Eselon IIB sebanyak 35 jabatan (terisi 34, kosong 1);
 - c. Jabatan Eselon IIIA sebanyak 68 jabatan (terisi);
 - d. Jabatan Eselon IIIB sebanyak 117 jabatan (terisi 116, kosong 1);
 - e. Jabatan Eselon IVA sebanyak 677 jabatan (terisi 617, kosong 60);
 - f. Jabatan Eselon IVB sebanyak 274 jabatan (terisi 152, kosong 122);
 - g. Jabatan Eselon VA sebanyak 68 jabatan (terisi 55, kosong 13).
2. Pejabat Fungsional Khusus sebanyak 7218 orang, yang terdiri dari :
 - a. Fungsional Guru sebanyak 5.751 orang;
 - b. Fungsional non Guru sebanyak 1.467 orang, yang terdiri dari :
 - 1) Apoteker : 10 orang;
 - 2) Asisten Apoteker : 36 orang;
 - 3) Auditor : 4 orang;
 - 4) Bidan : 289 orang;
 - 5) Dokter : 66 orang;
 - 6) Dokter Gigi : 9 orang;
 - 7) Epidemiolog Kesehatan : 1 orang;
 - 8) Fisioterapis : 6 orang;
 - 9) Nutrisionis : 27 orang;
 - 10) Pamong Belajar : 26 orang;
 - 11) Pekerja Sosial : 7 orang;
 - 12) Pengantar Kerja : 2 orang;
 - 13) Pengawas Ketenagakerjaan : 1 orang;
 - 14) Pengawas Mata Pelajaran : 106 orang;
 - 15) Pengawas Pemerintahan : 8 orang;
 - 16) Pengawas Rumpun : 106 orang;
 - 17) Pengawas TK / SD : 106 orang;
 - 18) Penilik : 40 orang;
 - 19) Penyuluh KB : 78 orang;
 - 20) Penyuluh Kehutanan : 18 orang;
 - 21) Penyuluh Kesehatan Masyarakat : 1 orang;
 - 22) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan : 1 orang;
 - 23) Penyuluh Pertanian : 78 orang;
 - 24) Perawat : 318 orang;
 - 25) Perawat Gigi : 29 orang;
 - 26) Perekam Medis : 13 orang;
 - 27) Pranata Laboratorium : 38 orang;
 - 28) Radiografer : 13 orang;
 - 29) Sanitarian : 26 orang;
 - 30) Teknisi Elektromedis : 4 orang.
 - c. Pejabat Fungsional Umum (staf) sebanyak 1.950 orang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011-2016

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Grobogan pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, maka untuk pembangunan Kabupaten Grobogan pada periode tahun 2011-2016, disusun visi sebagai berikut:

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera."

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat dan keunggulan di bidang industri pengolahan produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah Grobogan itu sendiri dan diupayakan pula menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan dari hasil pertanian tersebut.
- b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c. Sedangkan yang dimaksud masyarakat Grobogan yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan lahir (sandang, pangan, papan)



maupun kebutuhan bathin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram).

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Tujuan dan Sasaran

- **Untuk mencapai misi 1**, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana ekonomi, dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.
 - Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.



- Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.
- Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri.
- Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan.
 - Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan.
- Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana pembangunan pendidikan dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan.
 - Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana bidang pemerintahan dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.
- **Untuk mencapai misi 2**, maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
 - Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.
 - Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.
 - Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan sasaran antara lain:



- Meningkatnya tingkat ke bekerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
- Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan-satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD - SLTA dan lembaga pendidikan non formal.
- Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, dan tenaga kependidikan dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.
 - Meningkatnya prosentase guru yang telah bersertifikasi.
 - Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.
- Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.
 - Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
- Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.
 - Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.
- **Untuk mencapai misi 3**, maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
 - Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.
 - Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.
 - Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.



- Meningkatkan optimalisasi kesehatan para pekerja/ pegawai/ aparat dan masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Semakin minimalnya prosentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
 - Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
- **Untuk mencapai misi 4**, maka tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
 - Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
 - Meningkatkan upaya pemberdayaan para penyuluh pertanian dalam arti luas dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.
 - Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
 - Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan para pelaku usaha industri, perdagangan, dan pariwisata dengan sasaran antara lain sebagai berikut:
 - Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.
 - Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
 - Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.
 - Meningkatkan dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
- **Untuk mencapai misi 5**, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:



- Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
 - Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana.
 - Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
 - Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- Meningkatkan kualitas demokratisasi di daerah dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.
 - Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.
- Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain:
 - Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.
- **Untuk mencapai misi 6**, maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
 - Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan.
 - Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya



- Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya upaya reboisasi.
 - Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.
 - Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

2. RENCANA KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

Prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2014 yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2014 terdiri dari sepuluh prioritas. Perincian prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2014

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi2. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas3. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri5. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pariwisata
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya ketrampilan usaha industri danberkembangnya usaha industri2. Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat3. Meningkatnya usaha di sektor pariwisata4. Meningkatkan dan berkembangnya kelembagaan koperasisebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat5. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga7. Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan2. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana3. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat4. Dalam perencanaan pembangunan daerah di berbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender5. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.2. Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan3. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya4. Meningkatnya upaya reboisasi5. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.6. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita5. Semakin minimalnya prosentase absensi para pekerja/pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan6. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular7. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pelayanan kesehatan8. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka



Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
7. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas3. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampaidengan SLTA4. Meningkatnya tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan kejuruan.5. Meningkatnya perolehan jenjang akuditasi bagi satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD - SLTA dan lembaga pendidikan non formal.6. Meningkatnya prosentase guru yang memenuhi kualifikasiS1/ D47. Meningkatnya prosentase guru yang telah bersertifikasi8. Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalampengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan9. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan10. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan
8. Peningkatan kesadaran hukum.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi2. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum2. Meningkatnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal3. Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publikkepada aparat dan lembaga penegak hukum
10. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.2. Meningkatnya produksi perkebunan, kehutanan,peternakan, dan perikanan3. Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.4. Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upayapeningkatan produksi pertanian5. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman

Sumber : RKPD Kab. Grobogan Tahun 2014



B. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Penetapan Kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2014

Misi 1 : Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2014	PENANGGUNG JAWAB
1.1	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi.	Panjang jalan (km)	883,10	Dinas Bina Marga
		Persentase panjang jalan kondisi baik (%)	39,06	Dinas Bina Marga
		Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)	57,43	Dinas Bina Marga
		Persentase jembatan kondisi baik (%)	73,89	Dinas Bina Marga
		Persentase kendaraan yang layak jalan (%)	95	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pertanian dalam arti luas.	Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)	51,05	Dinas Pengairan
		Persentase embung kondisi baik (%)	63,81	Dinas Pengairan
		Persentase waduk kondisi baik (%)	63,81	Dinas Pengairan
1.3	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.	Jumlah pasar tradisional kondisi baik	12	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi



		Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha	4	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.4	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pengembangan industri.	Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha (%)	70	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
		Pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) (%)	5,80 – 6,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Laju inflasi (%)	4 – 9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Indeks Gini	0,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Rata-rata waktu penyelesaian 1 (satu) jenis perijinan	4 jam	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1.5	Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana pariwisata.	Jumlah restoran dan rumah makan (unit)	43	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah penginapan/hotel	10	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
1.6	Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat pembinaan kesehatan.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	70	Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu aktif (%)	99,46	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase PKK aktif (%)	98,89	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.7	Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	RSUD DR. R. Soedjati Sumodiardjo
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)	100	RSUD DR. R. Soedjati Sumodiardjo



		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95	Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	95	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan nifas (%)	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%)	90	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi (%)	90	Dinas Kesehatan
1.8	Meningkatnya ketersediaan pusat -pusat kegiatan pendidikan.	% TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri	70	Dinas Pendidikan
		% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	92	Dinas Pendidikan
		% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	79,5	Dinas Pendidikan
		% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik	40	Dinas Pendidikan
		% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik	100	Dinas Pendidikan
		% SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik	100	Dinas Pendidikan
		% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik	100	Dinas Pendidikan



1.9	Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.	% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	48	Dinas Pendidikan
		% SD/MI memiliki laboratorium IPA dan computer	15	Dinas Pendidikan
		% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	55	Dinas Pendidikan
		% SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan computer	66	Dinas Pendidikan
		% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	90	Dinas Pendidikan
		% SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	67	Dinas Pendidikan
1.10	Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pedesaan.	Jenis dan Jumlah Bank dan cabang (unit)	33	Bagian Perekonomian Setda
<p>Misi 2 : Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.</p>				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2014	PENANGGUNG JAWAB
2.1	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,9	Dinas Pendidikan



2.2	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.	Angka Melek Huruf (%)	97	Dinas Pendidikan
		Persentase penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis (orang)	97	Dinas Pendidikan
		Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun (orang)	571	Dinas Pendidikan
2.3	Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.	APK PAUD (%)	65	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI (%)	101,5	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs (%)	88,6	Dinas Pendidikan
		APK SMA/SMK/MA (%)	56,8	Dinas Pendidikan
		APM SD/MI (%)	95,9	Dinas Pendidikan
		APM SMP/MTs (%)	73,4	Dinas Pendidikan
		APM SMA/SMK/MA (%)	39,8	Dinas Pendidikan
2.4	Meningkatnya tingkat kebermanfaatan lulusan pendidikan kejuruan.	Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya (%)	17	Dinas Pendidikan
2.5	Meningkatnya perolehan jenjang akreditasi bagi satuan-satuan pendidikan baik di negeri maupun swasta pada jenjang SD-SLTA dan lembaga pendidikan non formal.	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit)	100	Dinas Pendidikan
2.6	Meningkatnya Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 (%)	81	Dinas Pendidikan
2.7	Meningkatnya Persentase guru yang telah tersertifikasi.	Persentase guru SD yang bersertifikasi (%)	75	Dinas Pendidikan



		Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi (%)	27	Dinas Pendidikan
		Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi (%)	48	Dinas Pendidikan
2.8	Meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.	Persentase guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan (%)	73	Dinas Pendidikan
		Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional (%)	40	Dinas Pendidikan
		Persentase guru SD/MI layak mengajar (%)	85	Dinas Pendidikan
		Persentase guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan (%)	92,5	Dinas Pendidikan
		Persentase guru SMA/SMK/MA layak mengajar (%)	98	Dinas Pendidikan
2.9		Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan dan pramuka.	Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%)	47,3
2.10	Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.	Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok)	95	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
2.11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm keg. olah raga.	Jumlah pemuda berprestasi (orang)	94	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
2.12	Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.	Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang)	91,8	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata



Misi 3 : Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2014	PENANGGUNG JAWAB
3.1	Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74	Dinas Kesehatan
3.2	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	105,8	Dinas Kesehatan
3.3	Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12,8	Dinas Kesehatan
3.4	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	13,6	Dinas Kesehatan
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	30	Dinas Kesehatan
		Persentase gizi buruk (%)	0,10	Dinas Kesehatan
3.5	Semakin minimalnya Persentase absensi para pekerja/ pegawai/ aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%)	30	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.6	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	65	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	Dinas Kesehatan



Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.					
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2014	PENANGGUNG JAWAB	
4.1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.	Produksi pertanian tanaman pangan utama :		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	
		- Padi	697.594		
		- Jagung	744.145		
		- Kedelai	79.852		
		- Kacang Hijau	25.055		
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama :		
			- Mangga	14.583	
			- Cabe Merah	1.094	
			- Melon	6.857	
			- Semangka	17.566	
4.2	Meningkatnya produksi produksi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.	Populasi produksi komoditas perkebunan utama :		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	
		- Kelapa	2.500		
		- Tebu rakyat	1.703,6		
		Dinas Peternakan dan Perikanan	Populasi produksi komoditas peternakan utama :		
			- Sapi potong	204.768	
4.3	Meningkatnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.	Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)	1.600.760	Dinas Peternakan dan Perikanan	
		Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	12,94	Dinas Peternakan dan Perikanan	
4.4	Meningkatnya peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.	Jumlah Penyuluh Pertanian (orang)	150	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura	
		Jumlah Penyuluh Peternakan (orang)	55	Dinas Peternakan dan Perikanan	



		Jumlah Kelompok Tani Kelas Pemula	340	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Lanjut	638	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	600	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura
		Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	92	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura
4.5	Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.	Jumlah Penyuluh Pertanian (PHP/ Pengamat Hama dan Penyakit) (orang)	51	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura
4.6	Meningkatnya ketrampilan usaha industri dan berkembangnya usaha industri.	Nilai produksi industri besar/ sedang (ribu rupiah)	324.195.236	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
		Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah)	215.583.888	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
		Nilai produksi industri rumah tangga (ribu rupiah)	414.346.179	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
		Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)	64,65	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
		Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah)	7	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
		Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah)	24	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi



4.7	Meningkatnya dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.	Daya beli masyarakat (Ribu Rupiah)	950	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai ekspor (US \$)		Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
		Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina	180	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi
4.8	Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	84.908	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit)	3	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah pengeluaran belanja wisatawan :	4.473.620	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
		- Wisatawan Nusantara (Rupiah)	145	
		- Wisatawan Mancanegara (US \$)	71.000	
		Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)	3	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
4.9	Meningkatnya dan berkembangnya kelembagaan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	31.600	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (%)	11,86	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah



		Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (%)	88	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Persentase koperasi aktif (%)	88,2	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
<p>Misi 5 : Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.</p>				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2014	PENANGGUNG JAWAB
5.1	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.	Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)	19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Grobogan (%)	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan program keluarga berencana.	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)	83,59	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	5	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	87	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	30	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)	1	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (orang/desa)	1 per 3 desa	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah PIK-KRR aktif (buah)	94,14	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	70	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5.3	Meningkatnya aktivitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.	Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%)	45	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah Linmas (orang)	9.974	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat



5.4	Meningkatkan kesetaraan gender	Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS)(%)	48,69	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase Perempuan dalam lembaga legislatif (%)	24	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor	40	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5.5	Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.	Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
5.6	Meningkatnya keberhasilan menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi rakyat yang optimal.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
5.7	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.	Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif	125	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	58	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi



		Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	58	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
		Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif	58	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
5.8	Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.	Jumlah kasus / konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)	1	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
		Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)	0	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Status Audit Keuangan Daerah	WTP	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.9	Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum.	Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)	118	Satuan Polisi Pamong Praja
<p>Misi 6 : Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.</p>				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2014	PENANGGUNG JAWAB
6.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.	Jumlah penambangan tanpa ijin	207	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi



		Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)	285	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase sampah yang terangkut (%)	8,75	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
		Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)	60	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6.2	Meningkatnya kegiatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap adanya berbagai jenis limbah dan pencemaran lingkungan.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	20	Badan Lingkungan Hidup
		Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	20	Badan Lingkungan Hidup
		Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	20	Badan Lingkungan Hidup
6.3	Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)	8,65	Badan Lingkungan Hidup
		Jumlah bangunan ber-IMB (unit)	525	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
6.4	Meningkatnya upaya reboisasi.	Luas lahan kritis (ha)	837,90	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)	23,09	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Luas hutan rakyat (ha)	17.775	Dinas Kehutanan dan Perkebunan



6.5	Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.	Persentase kerusakan kawasan hutan (%)	1,07	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6.6	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	80	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan
		Jumlah lumbung pangan	73	Badan Ketahanan Pangan
		Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)	48,32	Dinas Cipta Karya TRK
		Luas wilayah banjir (ribu ha)	2,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Luas wilayah kekeringan (ribu ha)	0,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program

Anggaran (Rp.)

Pendidikan

1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	833,000,000
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	52,415,283,000
3	Program Pendidikan Menengah	21,025,935,000
4	Program Pendidikan Non Formal	1,965,000,000
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,567,625,000
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	8,229,250,000
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	100,000,000
8	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	50,000,000
9	Program Pendidikan Non Formal	1,950,000,000



Kesehatan

1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	100,000,000
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	64,551,879,000
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	50,000,000
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	430,000,000
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	150,000,000
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	935,500,000
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	130,000,000
8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	290,000,000
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	305,000,000
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	72,974,666,000
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	86,000,000

Pekerjaan Umum

1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	14,524,850,000
2	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong – Gorong	2,850,000,000
3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	9,600,000,000
4	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	92,850,657,000
5	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	8,182,000,000
6	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6,500,000,000
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	175,000,000
8	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	364,000,000
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	18,544,264,000
10	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	12,137,840,000
11	Program Pengendalian Banjir	26,688,000,000
12	Pengaturan Jasa Konstruksi	345,000,000



Perumahan

1	Pogram Lingkungan Sehat Perumahan	5,065,364,000
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	35,000,000

Penataan Ruang

1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	300,000,000
2	Program Perencanaan Tata Ruang	1,000,000,000

Perencanaan Pembangunan

1	Program Pengembangan Data/ Informasi	2,109,000,000
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,945,000,000
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,340,000,000
4	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	935,000,000
5	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	150,000,000
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	490,000,000

Perhubungan

1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	500,000,000
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	160,000,000
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	270,000,000
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	603,377,000
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	30,000,000

Lingkungan Hidup

1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4,223,125,000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,274,875,000
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1,467,469,000
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	416,433,500



5	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	297,500,000
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100,000,000
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	145,000,000

Pertanahan

1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	428,000,000
---	--	-------------

Kependudukan dan Catatan Sipil

1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,715,650,000
---	--	---------------

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	863,730,000
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	502,600,000
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	39,460,000
4	Program Peningkatan Peran Sertda dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	175,000,000

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1	Program Keluarga Berencana	2,915,603,000
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	34,800,000
3	Program Pelayanan Kontrasepsi	101,140,000
4	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual, termasuk HIV/ AIDS	34,800,000
5	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	145,000,000
6	Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga Balita - Posyandu- PADU	226,450,000
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	200,000,000
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	275,000,000
9	Program Pembinaan Anak Terlantar	45,000,000



10	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	20,000,000
11	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	10,000,000
12	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	20,000,000
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	398,000,000
14	Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam	52,000,000

Ketenagakerjaan

1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	485,000,000
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	700,000,000
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	345,000,000

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	45,000,000
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	315,000,000
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	925,000,000

Penanaman Modal

1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	370,000,000
---	---	-------------

Kebudayaan

1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,200,000,000
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	250,000,000

Kepemudaan dan Olah Raga

1	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	45,000,000
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	350,000,000
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	750,000,000
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	550,000,000



5	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	86,325,000
6	Program Pemberdayaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan	200,000,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2,657,854,000
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	455,000,000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	68,000,000
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	160,000,000
5	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	30,000,000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,515,320,000
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,630,574,400
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	438,000,000
4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	90,000,000
5	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan	1,086,020,000
6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	85,000,000
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	460,000,000
8	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	18,000,000
9	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	210,000,000
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	231,000,000
11	Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	1,988,000,000
12	Program Penalaksanaan Pemerintah Daerah	344,000,000



13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internak dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,115,000,000
14	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	185,000,000
15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	17,000,000
16	Program Peningkatan dan Pengembangan SDM serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendapatan Daerah	13,000,000
17	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10,000,000
18	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal Pedesaan	5,000,000
19	Program Penunjang Pelayanan Pendidikan	5,000,000
20	Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perkotaan	20,000,000
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	41,824,500
22	Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	8,000,000
23	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	167,515,000
24	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,142,500,000
25	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,174,500,000
26	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	717,355,000
27	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	300,000,000
28	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	55,000,000
29	Program Pendukung Operasional Forum Terpadu Penanggulangan Bencana	25,000,000
Ketahanan Pangan		
1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,000,000
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4,392,555,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	6,576,586,000



2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	17,113,500
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1,892,599,000
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi, Perdesaan	596,600,000
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	77,000,000
6	Program Pengembangan Data	160,000,000
7	Program Pengentasan Kemiskinan	647,600,000

Statistik

1	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	240,000,000
---	--	-------------

Kearsipan

1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	50,000,000
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	338,000,000

Komunikasi dan Informatika

1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	669,500,000
2	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	85,000,000
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	305,000,000
4	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	20,000,000
5	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	355,000,000

Perpustakaan

1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	423,400,000
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Bahan Pustaka	41,000,000

Pertanian

1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,520,420,000
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	14,831,230,000



3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	516,690,000
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	110,000,000
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	830,000,000
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1,140,000,000
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6,085,737,000
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	340,000,000
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	2,237,000,000
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	114,000,000
11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	115,000,000
12	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1,486,000,000
Kehutanan		
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	175,000,000
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1,418,168,000
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	190,000,000
Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	950,000,000
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	50,000,000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Air Tanah	40,000,000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi	65,000,000
Pariwisata		
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	150,000,000
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	200,000,000



3 Program Pengembangan Kemitraan 445,000,000

Kelautan dan Perikanan

1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2,849,433,000
2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 100,000,000
3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan 210,000,000

Perdagangan

1 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan 130,000,000
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 100,000,000
3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri 1,111,000,000
4 Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar 25,000,000

Industri

1 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 415,000,000
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri 60,000,000
3 Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri
Potensial 95,000,000
4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 135,000,000

Ketransmigrasian

1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 350,000,000
2 Program Transmigrasi Lokal 190,000,000

**Jumlah / nilai pagu anggaran yang direncanakan
akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis
organisasi**

**Rp.
538,811,544,900**





BAB IV P E N U T U P

Dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditampilkan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Kebijakan Pemerintah Daerah** Tahun 2014, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2014. RKPD ini merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan prioritas pembangunan daerah, sebagai penjabaran dari visi misi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016.
2. Dalam RKPD tahun 2014, telah ditetapkan **Prioritas pembangunan daerah** Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
 - a. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
 - b. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - d. Peningkatan pemerataan pembangunan.
 - e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - f. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
 - g. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.
 - h. Peningkatan kesadaran hukum.
 - i. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
 - j. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas
3. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013, sedangkan perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2014.
4. Secara ringkas, **realisasi pelaksanaan APBD** Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh BPK RI, adalah sebagai berikut :
 - a. **Pendapatan Daerah**

Pada sisi pendapatan daerah target kinerjanya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.642.386.125.000,00



terrealisasi sebesar Rp1.711.056.213.805,00 atau sebesar 104,18%, melebihi anggaran sebesar Rp68.670.088.805,00. Jika dibandingkan dengan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2013 sebesar Rp1.549.709.105.117,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp161.347.108.688,00 atau 10,41%.

b. Belanja Daerah

Pada sisi belanja dari anggaran sebesar Rp1.788.253.908.250,00 terealisasi sebesar Rp1.645.804.824.542,00 atau sebesar 92,03% dan kurang dari anggaran sebesar Rp142.449.083.708,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp1.507.949.202.417,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp137.855.622.125,00 atau 9,14%.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2014 adalah sebesar Rp144.444.121.238,00 yang berarti 99,02 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp145.867.783.250,00.

Dari perhitungan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun 2012, terdapat surplus selisih antara pendapatan dan belanja daerah serta surplus pembiayaan daerah sehingga **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2014** sebesar Rp. Rp209.695.510.501,00,-.

5. Secara umum, capaian kinerja Sasaran Strategis tahun keempat RPJMD Kabupaten Grobogan 2011 – 2016 tercapai dengan **kualifikasi Sangat Baik (skor = 111,009%)** meskipun turun 2,671% dibanding capaian kinerja pada Tahun 2013 (skor 2013 = 113,680%). Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun keempat juga dapat dilihat dari pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2014 positif, mencapai 4,24%; Laju Inflasi Tahun 2014 sebesar 8,03%, lebih kecil dibanding inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 8,22%; Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013 sebesar 14,87%, turun 1,27% dibanding tahun sebelumnya; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,25%, turun 1,80% dibanding tahun sebelumnya.



Dari uraian diatas, secara makro Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 telah menyelenggarakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, meliputi urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan dapat berjalan secara baik dan kondusif.

Disadari bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena tidak mau atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, dimohonkan maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak diharap dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan kinerja ini, dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kepuasan masyarakat di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Purwodadi, Maret 2015

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO, SH